PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 2, September 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i2.103

KEBIJAKAN DAN KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH KOTA PALU DALAM PENINGKATAN INVESTASI PASCABENCANA 2018

* Dwi Maya Loka ZM[1], Fitri Sholihin, Reyva Alviona Fernanda Priskilla[3]

[1,2,3]Universitas Tadulako

Email: mayadwiloka@gmail.com*

Kata Kunci
1. **Kebijakan Investasi**
2. **Komunikasi Politik**
3. **Pascabencana**
4. **Governance**
5. **Kota Palu**

Abstrak: Bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang melanda Kota Palu pada 28 September 2018 berdampak besar terhadap kehidupan sosial dan perekonomian daerah, termasuk iklim investasi. Pemulihan investasi tidak hanya membutuhkan kebijakan ekonomi dan kemudahan perizinan, tetapi juga komunikasi politik pemerintah yang mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat dan investor. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam peningkatan investasi pascabencana, strategi komunikasi politik yang digunakan untuk menyampaikan kebijakan kepada investor dan masyarakat, efektivitas komunikasi dalam membangun kepercayaan, serta merumuskan arah model komunikasi politik pemerintah daerah dalam mendukung investasi. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data direncanakan diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait, pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Palu, pelaku usaha, dan investor. Analisis diarahkan pada perspektif governance, komunikasi politik, framing, dan implementasi kebijakan Edward III. Karena naskah sumber merupakan rancangan penelitian, uraian artikel ini menyajikan dasar masalah, kerangka teori, dan rancangan analisis, bukan temuan empiris penelitian lapangan

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 2, September 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i2.103

Keyword
1. ***Investment Policy***
2. ***Political Communication***
3. ***Post-Disaster***
4. ***Governance***
5. ***Palu City***

Abstract: *The earthquake, tsunami, and liquefaction that struck Palu City on 28 September 2018 severely affected the region's social and economic conditions, including its investment climate. Investment recovery requires not only economic policies and streamlined licensing, but also effective political communication by local government to rebuild public and investor confidence. This article aims to examine the Palu City Government's policies to increase post-disaster investment, its political communication strategies for conveying those policies to investors and the public, the role of communication in building trust, and the possible direction of a local-government political communication model to support investment. The study is designed as qualitative descriptive-analytical research. Data are planned to be collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving relevant local government agencies, the Palu Special Economic Zone, business actors, and investors. The analytical framework draws on governance theory, political communication, framing, and Edward III's policy implementation model. Since the source manuscript is a research proposal, this article presents the research rationale, theoretical framework, and analytical design rather than empirical field findings.*

PENDAHULUAN

Bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang melanda Kota Palu pada 28 September 2018 menjadi salah satu bencana besar dalam sejarah Indonesia. Bencana tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu aktivitas perekonomian daerah, menurunkan kepercayaan investor, serta memengaruhi daya saing investasi Kota Palu. Kerugian dan kerusakan akibat bencana di Sulawesi Tengah diperkirakan mencapai Rp18,48 triliun dan berdampak pada sektor infrastruktur, perdagangan, industri, pariwisata, serta investasi.

Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan logistik di kawasan timur Indonesia. Sebelum bencana, perkembangan ekonomi kota didukung antara lain oleh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dan berbagai potensi ekonomi unggulan. Pascabencana, pemerintah daerah menghadapi tantangan untuk memulihkan perekonomian sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat dan investor melalui kebijakan pemulihan serta pembangunan ekonomi daerah.

Investasi merupakan salah satu instrumen penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, menggerakkan sektor usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam kerangka kebijakan nasional, penanaman modal diatur antara lain melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Palu menempatkan peningkatan investasi sebagai bagian dari agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Berbagai langkah yang disebutkan dalam draf penelitian meliputi penguatan pelayanan perizinan terpadu, digitalisasi layanan melalui Online Single Submission (OSS), penyederhanaan birokrasi, pengembangan KEK Palu, dan promosi potensi

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 2, September 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i2.103

investasi daerah. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palu yang dikutip dalam draf menunjukkan realisasi investasi sekitar Rp1,21 triliun pada 2018 dan meningkat menjadi Rp1,94 triliun pada 2019. Setelah mengalami fluktuasi, realisasi investasi disebut mencapai Rp1,27 triliun pada 2023. Angka-angka tersebut menjadi konteks awal yang perlu ditelusuri lebih lanjut melalui dokumen resmi dan wawancara dalam pelaksanaan penelitian.

Keberhasilan kebijakan investasi tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh cara pemerintah mengomunikasikannya kepada masyarakat, dunia usaha, dan investor. Dalam perspektif komunikasi politik, pemerintah berperan menyampaikan pesan pembangunan, membentuk citra daerah, membangun kepercayaan publik, dan menjelaskan prospek ekonomi daerah. Komunikasi yang transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan berpotensi mengurangi ketidakpastian serta memperkuat legitimasi kebijakan.

Penelitian terdahulu yang dirujuk dalam draf menunjukkan pentingnya penyebaran informasi dalam proses rekonstruksi dan pemulihan pascabencana di Kota Palu (Akifah et al., 2021). Kajian mengenai peran humas Pemerintah Kota Palu juga menyoroti penanganan isu negatif pascabencana (Salanggon & Kaddi, 2020). Sementara itu, Amra (2024) mengidentifikasi potensi ekonomi daerah Kota Palu pascabencana, termasuk sektor industri pengolahan yang menunjukkan pertumbuhan kompetitif. Meskipun demikian, hubungan khusus antara komunikasi politik pemerintah daerah dan peningkatan investasi pascabencana masih perlu dikaji secara lebih terarah.

Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Palu dalam peningkatan investasi pascabencana 2018; (2) bagaimana strategi komunikasi politik pemerintah dalam menyampaikan kebijakan investasi kepada investor dan masyarakat; (3) bagaimana komunikasi tersebut berperan dalam membangun kepercayaan investor dan mendukung peningkatan investasi; serta

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 2, September 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i2.103

(4) bagaimana model komunikasi politik pemerintah daerah yang dapat dirumuskan untuk mendukung investasi pascabencana. Tujuan penelitian adalah menganalisis kebijakan, strategi dan efektivitas komunikasi politik, serta merumuskan model komunikasi politik pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan investasi

LANDASAN TEORI

Governance Theory

Teori *governance* menggeser pandangan *government* yang menempatkan pemerintah sebagai aktor tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif *governance*, pembangunan dan penyelesaian masalah publik melibatkan interaksi pemerintah dengan sektor swasta, masyarakat sipil, komunitas lokal, dan aktor lainnya.

Rhodes (1996) memandang governance sebagai jaringan organisasi yang saling bergantung (*interdependent networks*). Kooiman (2003) menekankan pola interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat dalam mengelola persoalan publik melalui mekanisme kolaborasi. Pierre dan Peters (2000) juga menempatkan koordinasi berbagai aktor sebagai bagian penting dalam pencapaian tujuan pembangunan dan pengelolaan sumber daya publik. Dalam penelitian ini, governance digunakan untuk membaca hubungan Pemerintah Kota Palu dengan pelaku usaha, investor, pengelola KEK, dan masyarakat dalam agenda peningkatan investasi.

Teori Komunikasi Politik

McNair (2011) menjelaskan komunikasi politik sebagai bentuk komunikasi yang berkaitan dengan aktivitas politik, pemerintahan, kebijakan publik, dan proses memengaruhi opini publik. Komunikasi politik pemerintah tidak terbatas pada kampanye elektoral, tetapi juga mencakup penyampaian kebijakan, program pembangunan, dan keputusan publik kepada masyarakat. Unsur yang diperhatikan

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 2, September 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i2.103

meliputi komunikator politik, pesan politik, media komunikasi, khalayak sasaran, dan efek komunikasi.

Dalam konteks penelitian ini, Pemerintah Kota Palu dan perangkat daerah terkait diposisikan sebagai komunikator; kebijakan serta peluang investasi sebagai pesan; kanal tatap muka dan media digital sebagai saluran; sedangkan masyarakat, pelaku usaha, dan investor merupakan khalayak sasaran. Analisis diarahkan untuk memahami bagaimana pesan pemerintah disusun, disebarkan, diterima, dan dinilai oleh khalayak.

Teori *Framing*

Entman (1993) menjelaskan *framing* sebagai proses menyeleksi aspek tertentu dari realitas dan menonjolkannya dalam pesan komunikasi sehingga khalayak diarahkan pada pemahaman atau interpretasi tertentu. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda bergantung pada cara aktor komunikasi membingkainya. Dalam penelitian ini, framing digunakan untuk mengkaji bagaimana pemerintah mendefinisikan persoalan investasi pascabencana, menjelaskan penyebabnya, membangun nilai dan legitimasi kebijakan, serta menawarkan solusi.

Teori Implementasi Kebijakan Publik

Edward III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut digunakan untuk menelaah pelaksanaan kebijakan investasi di Kota Palu, termasuk konsistensi informasi antarlembaga, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, dan prosedur koordinasi birokrasi

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 2, September 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i2.103

METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam kebijakan dan komunikasi politik Pemerintah Kota Palu dalam peningkatan investasi pascabencana 2018, termasuk makna, strategi, proses, dan interaksi antaraktor. Creswell dan Creswell (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau fenomena tertentu.

Penelitian berlokasi di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi dan unit perhatian meliputi Pemerintah Kota Palu, DPMPTSP Kota Palu, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), Bappeda Kota Palu, KEK Palu, serta pelaku usaha dan investor. Pemilihan lokasi didasarkan pada pengalaman langsung Kota Palu menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi tahun 2018 serta agenda pemulihan ekonomi melalui peningkatan investasi.

Fokus penelitian mencakup lima aspek. Pertama, kebijakan peningkatan investasi yang meliputi regulasi, pelayanan perizinan, promosi investasi, pengembangan KEK Palu, dan pemulihan ekonomi daerah. Kedua, komunikasi politik pemerintah yang meliputi komunikator, pesan, media, khalayak sasaran, dan efek komunikasi. Ketiga, framing pemerintah terhadap investasi pascabencana, yaitu definisi masalah, penyebab masalah, nilai dan legitimasi kebijakan, serta solusi yang ditawarkan. Keempat, implementasi kebijakan berdasarkan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kelima, dampak yang akan ditelusuri meliputi kepercayaan investor, minat investasi, realisasi PMDN/PMA, dan persepsi pelaku usaha.

Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam kebijakan investasi maupun komunikasi politik pemerintah. Informan utama yang direncanakan meliputi Wali Kota

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 2, September 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i2.103

Palu atau pejabat yang mewakili, Kepala DPMPTSP Kota Palu, Kepala Bappeda Kota Palu, dan Kepala Dinas Kominfo Kota Palu. Informan dapat dilengkapi dengan pihak pengelola KEK, pelaku usaha, dan investor sesuai kebutuhan pendalaman data.

Pengumpulan data direncanakan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan investasi pascabencana, strategi komunikasi politik, faktor pendukung dan penghambat investasi, serta persepsi investor terhadap Kota Palu. Kedua, observasi terhadap pelayanan investasi di DPMPTSP, kegiatan promosi investasi, forum komunikasi pemerintah dengan investor, dan media komunikasi pemerintah daerah. Ketiga, dokumentasi yang mencakup RPJMD Kota Palu, dokumen DPMPTSP, data realisasi investasi PMDN/PMA, laporan kinerja pemerintah daerah, publikasi BPS Kota Palu, berita media massa, konten media sosial pemerintah daerah, serta dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kondensasi dilakukan melalui pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data sesuai fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, matriks, bagan hubungan antaraktor, dan peta komunikasi politik. Selanjutnya, kesimpulan diverifikasi dengan menelaah keterkaitan antara implementasi kebijakan investasi, strategi komunikasi politik, pola framing pemerintah, dan efektivitas komunikasi dalam mendukung peningkatan investasi

PEMBAHASAN

Kebijakan Investasi sebagai Instrumen Pemulihan Pascabencana

Penelitian menempatkan peningkatan investasi sebagai salah satu agenda pemulihan ekonomi Kota Palu setelah bencana 2018. Kebijakan yang perlu ditelusuri

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 2, September 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i2.103

meliputi regulasi penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu, digitalisasi OSS, penyederhanaan birokrasi, pengembangan KEK Palu, dan promosi potensi daerah. Dalam kerangka implementasi Edward III, keberadaan kebijakan formal perlu dibaca bersama kapasitas sumber daya, sikap pelaksana, komunikasi antarlembaga, dan struktur birokrasi yang menjalankannya.

Data realisasi investasi yang dicantumkan dalam draf—sekitar Rp1,21 triliun pada 2018, Rp1,94 triliun pada 2019, dan Rp1,27 triliun pada 2023—menunjukkan dinamika yang menjadi titik awal penelitian. Data tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa perubahan realisasi investasi disebabkan oleh komunikasi politik pemerintah. Penelitian lapangan perlu memeriksa sumber, definisi, komposisi PMDN/PMA, perubahan tahunan, serta faktor ekonomi dan kebijakan lain yang mungkin memengaruhinya.

Komunikasi Politik dan Pembentukan Kepercayaan Investor

Komunikasi politik menjadi dimensi penting karena keputusan investasi turut dipengaruhi persepsi mengenai stabilitas pemerintahan, kepastian regulasi, keamanan investasi, kualitas pelayanan publik, dan citra daerah. Dengan menggunakan kerangka McNair, penelitian dapat mengidentifikasi aktor yang menyampaikan informasi, substansi pesan mengenai pemulihan dan peluang investasi, media yang digunakan, kelompok sasaran, serta respons yang muncul. Perhatian khusus perlu diberikan pada konsistensi pesan antara pimpinan daerah dan perangkat teknis.

Kepercayaan investor tidak dapat diasumsikan terbentuk hanya karena intensitas promosi. Informasi yang disampaikan perlu dapat diverifikasi, sesuai dengan kondisi lapangan, dan diikuti pelayanan yang responsif. Karena itu, wawancara dengan investor dan pelaku usaha penting untuk membandingkan narasi resmi pemerintah dengan

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 2, September 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i2.103

pengalaman penerima layanan dan pertimbangan aktual dalam mengambil keputusan investasi.

Framing Investasi Pascabencana

Perspektif framing Entman memungkinkan penelitian menelaah bagaimana pemerintah mengonstruksi narasi tentang Kota Palu setelah bencana. Analisis dapat diarahkan pada cara pemerintah mendefinisikan tantangan investasi, menjelaskan penyebab hambatan, menonjolkan potensi dan legitimasi kebijakan, serta menawarkan solusi. Pembingkaian yang menekankan ketangguhan dan peluang ekonomi perlu diuji terhadap keterbukaan informasi mengenai risiko bencana, kesiapan infrastruktur, dan kepastian tata ruang agar komunikasi tidak berhenti pada pencitraan.

Media komunikasi pemerintah, termasuk publikasi resmi dan media sosial, dapat menjadi bahan dokumentasi untuk melihat konsistensi narasi dari waktu ke waktu. Analisis tersebut juga perlu memperhatikan isu negatif, koordinasi informasi, serta ruang partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan umpan balik.

Kolaborasi Governance dalam Pengembangan Investasi

Teori governance menempatkan peningkatan investasi sebagai proses yang membutuhkan koordinasi lintas aktor. Pemerintah daerah memiliki peran dalam regulasi, fasilitasi, dan pelayanan, sementara sektor swasta, pengelola KEK, masyarakat, serta investor membawa sumber daya dan pengetahuan yang berbeda. Dengan demikian, forum komunikasi pemerintah dan investor, kemitraan, serta mekanisme koordinasi antarlembaga menjadi aspek yang perlu ditelusuri.

Keempat kerangka teori dalam penelitian ini saling melengkapi. Governance menjelaskan pola hubungan antaraktor; komunikasi politik menguraikan proses penyampaian pesan; framing menelaah konstruksi makna dalam pesan pemerintah;

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 2, September 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i2.103

sedangkan model Edward III membantu mengevaluasi faktor implementasi kebijakan. Penggabungan kerangka tersebut diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan kebijakan, komunikasi, kepercayaan, dan dinamika investasi pascabencana.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peningkatan investasi Kota Palu pascabencana 2018 perlu dipahami sebagai agenda yang tidak hanya berkaitan dengan kebijakan ekonomi dan pelayanan perizinan, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah membangun komunikasi politik yang transparan, konsisten, dan dipercaya. Kajian ini mengintegrasikan perspektif governance, komunikasi politik, framing, dan implementasi kebijakan untuk menganalisis hubungan antara kebijakan investasi, komunikasi pemerintah, kepercayaan investor, serta dinamika realisasi investasi. Simpulan ini merupakan arah argumentasi dan fokus kajian berdasarkan proposal, bukan hasil verifikasi empiris.

Implikasi dan Agenda Penelitian

Pelaksanaan penelitian perlu memverifikasi data investasi melalui sumber resmi, menggali pengalaman investor dan pelaku usaha, serta membandingkan pesan pemerintah dengan praktik pelayanan dan kondisi investasi. Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat menjadi dasar perumusan model komunikasi politik pemerintah daerah yang mengintegrasikan transparansi informasi, koordinasi lintas perangkat daerah, promosi potensi secara kredibel, dan pelibatan aktor nonpemerintah

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 2, September 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i2.103

DAFTAR PUSTAKA

Akifah, A., Alfiyaty, R., & Kudratullah. (2021). Evaluasi penyebaran informasi pada proses rekonstruksi pasca bencana alam di Kota Palu. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 2(11), 119–129. https://www.sthf.ac.id/jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/501

Amra, I. (2024). Analisis potensi ekonomi daerah Kota Palu pasca bencana gempa bumi, likuifaksi dan tsunami tahun 2018. Anterior Jurnal, 23(2), 78–85. https://doi.org/10.33084/anterior.v23i2.4593

Badan Pusat Statistik Kota Palu. (2025). Kota Palu dalam angka 2025. BPS Kota Palu. https://palukota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/bf343fe78d5096bf37785bd5/kota-palu-dalam-angka-2025.html

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51–58. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x

Kooiman, J. (2003). Governing as governance. Sage Publications.

McNair, B. (2011). An introduction to political communication (5th ed.). Routledge.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.

Pemerintah Kota Palu. (2024). Data penanaman modal dan pelayanan satu pintu terpadu. Satu Data Kota Palu. https://satudata.palukota.go.id/penanaman-modal-dan-pelayanan-satu-pintu-terpadu/

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 2, September 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i2.103

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. (2018). Rencana induk pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). Governance, politics and the state. Macmillan Press.

Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. Political Studies, 44(4), 652–667. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x

Sadli, S. (2025). Implementasi kebijakan penanganan penyintas pasca bencana alam likuifaksi 2018 di Kota Palu (Kasus korban likuifaksi Kelurahan Petobo) [Skripsi Sarjana, Universitas Tadulako]. Repository Universitas Tadulako. https://repository.untad.ac.id/id/eprint/113695

Salanggon, M. L., & Kaddi, S. M. (2020). Peran humas Pemerintah Kota Palu dalam menangani isu negatif mengenai penanganan pasca bencana di Kota Palu tahun 2018. Kinesik: Jurnal Ilmu Komunikasi, 7(2), 161–174. https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/kinesik/article/view/128

United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development. UNDP.

PARADIGMA : Jurnal Administrasi Publik
Vol. 5 No. 2, September 2026
ISSN : 2828-5735
DOI : 10.55100/paradigma.v5i2.103